



Judul : Holding Gula Genjot Kesejahteraan Petani?
Tanggal : Sabtu, 25 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Butuh Dana Rp 23 Triliun Holding Gula Genjot Kesejahteraan Petani?

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto memahami target besar pemerintah mewujudkan kemandirian gula konsumsi nasional dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Ini dilakukan melalui skema pembentukan pabrik gula milik pemerintah ke dalam PT Sinergi Gula Nasional (SGN).

Namun, untuk mewujudkan pembentukan PT SGN setidaknya dibutuhkan dana Rp 23 triliun. "Itu untuk membangun 5 pabrik gula baru dan merevitalisasi satu pabrik gula *existing*," jelas Darmadi di Jakarta, kemarin.

Darmadi menjelaskan, Komisi VI DPR telah membahas pembentukan holding pabrik gula (SugarCo) atau PT SGN bersama para direksi PT Perkebunan Nusantara II, III, VII, IX, X, XI, XII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV, Senin (20/09).

Hanya saja, belum ada penjelasan lebih rinci dari pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait upaya kemandirian gula konsumsi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Padahal, tujuan utama pembentukan holding ini mewujudkan kemandirian gula konsumsi, mengurangi impor gula, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga jual ritel.

"Dari paparan mereka (PTPN) harusnya lebih menonjolkan langkah-langkah pembentukan PT Sinergi Gula Nasional dalam mencapai sasaran tersebut," katanya.

Dia lalu menyoroti solusi yang ditawarkan PTPN dengan membentuk PT SGN melalui skema pelepasan saham (IPO) untuk investor 49 persen dan PTPN III 51 persen.

Hasil perhitungannya, skema ini justru mengandung risiko cukup besar di kemudian hari. Walau investor yang memiliki saham PT SGN nanti sahamnya tidak mayoritas, namun komposisi kepemilikan saham tetap berisiko.

Sebab, investor tetap bisa menempatkan orang-orang mereka pada posisi direksi dan komisaris dalam holding tersebut.

Menurutnya, jika ada kesepakatan antara PTPN dengan investor bahwa holding ini menitikberatkan peningkatan produksi gula dalam negeri dan mengangkat kesejahteraan para petani, mungkin tidak terlalu bermasalah. "Tetapi masalahnya menyatukan orientasi yang berbeda-beda juga tidak mudah," katanya.

Darmadi menambahkan, PTPN sebenarnya sudah menyiapkan peta jalan menuju swasembada gula melalui pembentukan holding ini. Ditargetkan hingga 2030 akan tercapai 283.000 lahan perkebunan tebu dengan produktivitas tebu mencapai 9,3 ton per hektare dan rendemen 11,1 persen dengan Biaya Produksi Pokok (BPP) sebesar 8.200 per kilogram.

Darmadi menilai, target ini terbilang cukup sulit, sebab produktivitas tebu dalam negeri terbilang cukup rendah, mencapai 5 ton per hektare dengan BPP Rp 9.857 per kilogram. "Memang ini kelihatan bombastis sehingga saya kira perlu pendalaman lebih lanjut," jelasnya.

Namun demikian, dia berharap betul pembentukan holding ini kelak bermuara pada terciptanya kemandirian gula nasional. Bukan sebaliknya, malah menjadi ajang pemburuan rente. ■ KAL